



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2023 -2026**



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	47
 Bab III Permasalahan dan Isu- Isu Strategis Perangkat Daerah	
3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis	49
 Bab IV Tujuan dan Sasaran	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	51
 Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	53
 Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	55
 Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	67
 Bab VIII Penutup	68
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Gubernur untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD Provinsi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi agar memperhatikan :

1. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021.
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome).

4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.
5. Kebijakan nasional.
6. Regulasi yang berlaku.
7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 disusun menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Publik;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40 Tahun 2010, yang mengatur fungsi penyelenggaraan **PTSP** Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja pada dinas daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menyesuaikan sasaran dan indikator Perangkat Daerah;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UKM 2023-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Menengah Perangkat Daerah

Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari:

Menurut Peraturan Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Fungsi

Dalam Penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaran kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. enyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Balai Latihan Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan program kerja bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian,

keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas serta UPTD;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan lingkup Dinas;

- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas;
- m. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- o. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- p. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- q. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- r. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3 . BIDANG KOPERASI

Tugas : memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Koperasi.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Koperasi;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Koperasi;
- c. Penyelenggaraan verifikasi penyusunan rumusan kebijakan bidang koperasi;

- d. Penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
- e. Penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;
- f. Penyelenggaraan verifikasi data kesehatan KSP /USP;
- g. Penyelenggaraan verifikasi rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- h. Penyelenggaraan verifikasi rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan kelembagaan dan perizinan, pemberdayaan dan pengembangan, dan pengawasan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan Koperasi;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberdayaan dan pengembangan koperasi dalam peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- n. Penyelenggaraan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/ Kota;
- o. Penyelenggaraan evaluasi pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/ Kota;
- p. Penyelenggaraan evaluasi seluruh kegiatan kelembagaan dan perizinan, pemberdayaan dan pengembangan, dan pengawasan;
- q. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- r. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- s. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4 . BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Tugas: memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pemberdayaan UKM;
- c. Penyelenggaraan verifikasi data UKM;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemetaan potensi kewirausahaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penciptaan iklim kewirausahaan;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penumbuhkembangan wirausaha dan inkubasi wirausaha;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kemitraan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan;
- i. Penyelenggaraan evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pendataan dan penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan kemitraan;
- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5 . BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Tugas: memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Pengembangan Usaha Kecil.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja bidang Pengembangan Usaha Kecil;
- b. Penyelenggaraan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan Usaha Kecil;
- c. Penyelenggaraan verifikasi data untuk bahan perumusan kebijakan Pengembangan Usaha Kecil;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan di bidang peningkatan kualitas dan standarisasi produk;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan akses pembiayaan/ permodalan;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan promosi dan pemasaran produk baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan usaha di bidang produksi, pengembangan diversifikasi produk dan standarisasi produk;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan strategi pengembangan usaha;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian seluruh kegiatan peningkatan kualitas dan standarisasi produk, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- j. Penyelenggaraan evaluasi dan mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas dan standarisasi produk, pembiayaan, promosi dan pemasaran;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- l. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6 UPTD BALAI PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM

Tugas: melaksanakan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Fungsi:

- a. penyelenggara pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM
- b. penyelenggara dan koordinasi pelatihan tenaga KUMKM.

Pada tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan yang akan mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang terdiri dari 1 (satu) program rutin dan 6 (lima) program teknis dengan uraian kegiatan secara rinci yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan:

- 1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan:

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kegiatan:
 - 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Kegiatan:
 - 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Kegiatan:
 - 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
Kegiatan:
 - 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
7. Program Pengembangan UMKM
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

2.2 Sumber Daya Manusia

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2021 dalam melaksanakan pengelolaan urusan

Pemerintahan didukung sebanyak 85 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 55 orang PNS.

Jumlah tenaga honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 berjumlah 40 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 29 orang, D3 sebanyak 8 orang, SMU sebanyak 9 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 14 orang. Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS/CPNS) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	5	4	9
3	Sarjana / S1	16	11	27
4	Diploma-IV	1	-	1
5	Diploma-III	4	4	8
6	SLTA	7	2	9
7	SLTP	-	-	-
JUMLAH		33	21	54

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PHL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana / S1	9	6	15
2	Diploma-III	3	-	3
3	SLTA	14	7	21
4	SLTP	1	-	1
JUMLAH		27	13	40

**Tabel 1.3 Klasifikasi Eselon Pegawai PNS/CPNS
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2021**

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	-	-	-
2	II B	-	-	-
3	III A	2	2	2
4	III B	-	1	1
5	IV A	10	4	14
6	IV B	-	-	-
7	Non Eselon	10	11	27
8	Fungsional	7	1	8
JUMLAH		29	19	55

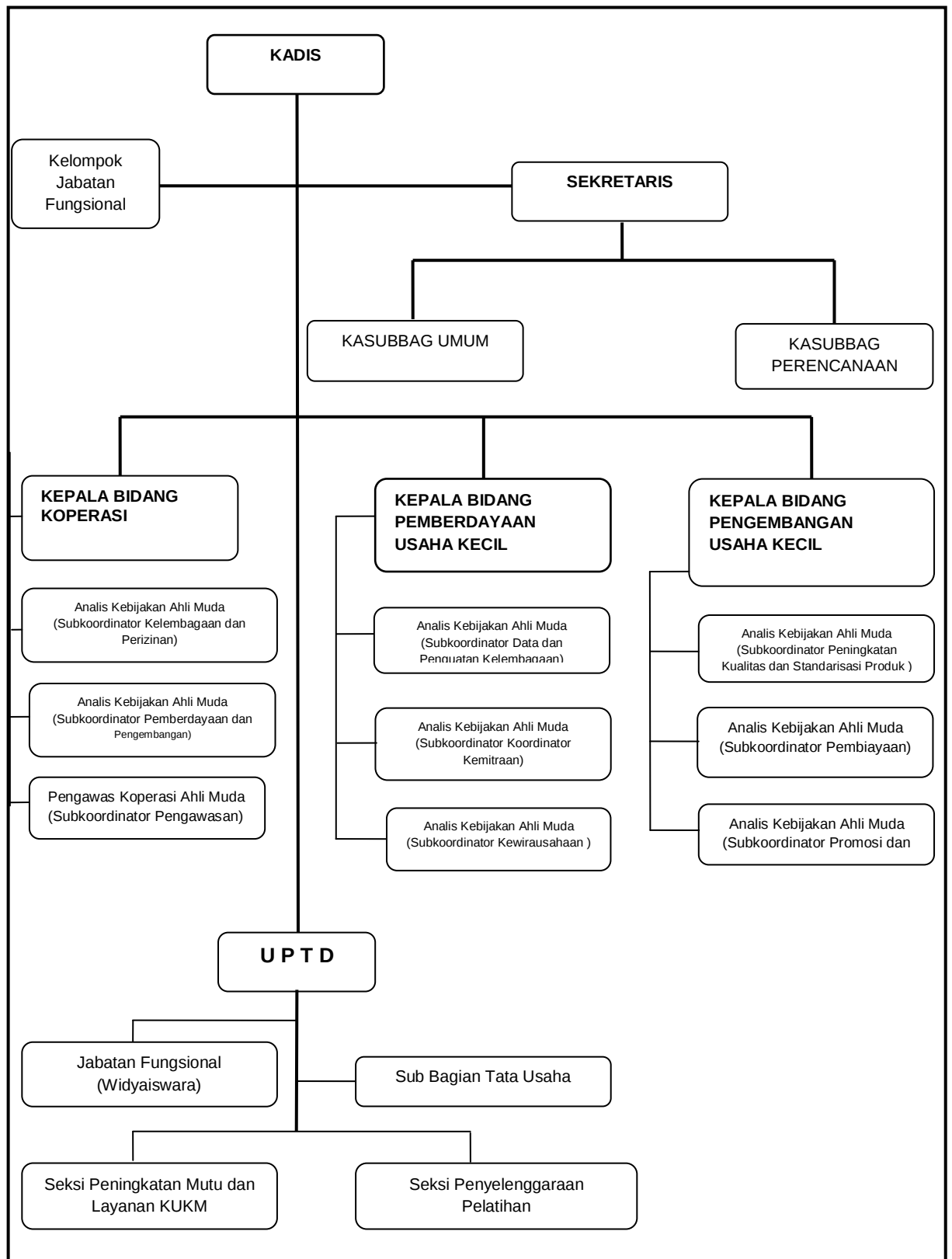
**Tabel 1.4 Klasifikasi Keadaan Pegawai PNS, CPNS
dan Tenaga Kontrak
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Tahun 2021**

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	1	-	-	-	-	1
3	SLTA	21	-	7	2	-	30
4	Sarjana Muda	3	-	4	4	-	11
5	Sarjana (S1)	15	-	-	24	4	43
6	Pasca Sarjana	-	-	-	3	6	9

Jumlah	40	-	11	33	101	94
---------------	----	---	----	----	-----	----

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu gedung dan tanah, kendaraan roda empat sebanyak 3 unit, kendaraan roda dua sebanyak 4 unit serta sarana dan prasarana lainnya seperti komputer, laptop, Printer, meja kerja, lemari, kursi kerja dan lain-lain

Pengorganisasian pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan melalui bagan struktur organisasi berikut ini :



2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Outcome/Output	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Renstra PD Tahun ke					Rasio Capaian Renstra PD Tahun ke				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program: Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	3	3	3			3	3	3			100	100	100		
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	100					100					100				
		Jumlah pegawai DPMPTSP yang terlayani		62 orang	62 orang			54	52	62				83.8 7			
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan	100					100					100				

		sarana prasarana selama 12 bulan															
		Jumlah paket pemenuhan sarana dan prasarana kantor		18	8			7	10	8				55.56	100		
		Jumlah kendaraan yang terpelihara		7	4			15	3	4				42.86	100		
		Jumlah sarana dan Prasarana Kantor yang Terpelihara		6	6			6	5	6				83.33	100		
	Peningkatan disiplin aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya	100	100	100			100	0	0			100	0	0		
	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	0	100	100			0	70	0			0	70	70		
	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%	4					4					100				
		Jumlah peserta rakor	35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)					35					100				

			an)														
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah		4	4				4	4				100	100		
		Jumlah peserta rakor		35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)	35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)				0	35				0	100		
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	3										100				
		Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah		3	3			3	3	3				100	100		
	Peningkatan Gedung Kantor	Persentase peningkatan gedung kantor	100	100	0			0	0	0			0	0	0		
	Peningkatan Pelayanan Kantor UPTD PTSP	Operasional Cabang Dinas/UPTD PTSP wilayah kerja Belitung	0	0	12 bulan			0	0	12			0	0	100		
		Jumlah pelayanan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana dan	0	0	12 bulan			0	0	12			0	0	100		

		prasarana UPTD yang dikelola															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD				76	77				76						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi				14 Dokumen	14 Dokumen				14						
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Renstra PD dan Renja PD)				7 Dokumen	7 Dokumen				7						
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok Evaluasi kinerja PD (Dalev Triwulan I, Dalev triwulan II, Dalev Triwulan III, Dalev Trwiulan IV, LKPJ, LAKIP, dan LPPD)				7 Dokumen	7 Dokumen				7						
		Survey Kepuasan Pelayanan Internal (DPMPSTP)				85%	90%				85						
	Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat waktu				2 Laporan	2 Laporan				2						
	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Laporan Administrasi Gaji				2 Laporan	2 Laporan				2						

	Gaji dan Tunjangan ASN	dan Tunjangan															
	Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Survey Kepuasan Pelayanan Kepegawaian				85%	86%				-						
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				-	120 stel				-						
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	20 orang				-						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan				2						
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia				50 Jenis	50 Jenis										
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia				50 Unit	50 Unit										

	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia				1173 Unit	1173 Unit										
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak				19000 Eksemplar	19000 Eksemplar										
		Jumlah Penggandaan				100000 Lembar	100000 Lembar										
		Jumlah Penjilidan															
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Yang Tersedia				4000 Eksemplar	4000 Eksemplar										
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis ATK Yang Dibeli				80 Jenis	80 Jenis										
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu Yang Tersedia				1800 Pax	1800 Pax										
		Jumlah Makan dan Minum Rapat Yang Tersedia				1004 Pax	1004 Pax										
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dilaksanakan				70 Kali	70 Kali										
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke				70 Kali	70 Kali										

		Dalam Daerah Yang Dilaksanakan															
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Jenis	3 Jenis				3						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang Yang Dikirim				500 Surat / Barang	500 Surat / Barang										
		Jumlah Materai				495 Lembar	495 Lembar										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, Tv Kabel, Virtual Meeting Yang Dibayarkan				12 Bulan	12 Bulan										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Dipekerjakan				18 orang	18 orang				18						
		Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia				100 Jenis	100 Jenis										
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Jenis BMD Yang Dipelihara				10 Jenis	10 Jenis										

	Pemerintahan Daerah																
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki				15 Unit / Jenis	15 Unit / Jenis										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung / Bangunan Yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara				1 Unit / Jenis / Set	1 Unit / Jenis / Set				1						
		Jumlah BBM Genset				400 liter	400 liter										
		Survey Kepuasan Pelayanan Internal (UPT PPT				85%	86%				85						

		Belitung)															
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				2 Kegiatan	2 Kegiatan				2						
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia				50 Jenis	50 Jenis										
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia				50 Unit	50 Unit										
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Tersedia				1173 Unit	1173 Unit										
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak				10000 Eksemplar	10000 Eksemplar										
		Jumlah Penggandaan				90000 Lembar	90000 Lembar										
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia				1040 Eksemplar	1040 Eksemplar										
	Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Jenis ATK Yang Dibeli				80 Jenis	80 Jenis										

	Bahan/Material																
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum Tamu Yang Tersedia				200 Pax	200 Pax										
		Jumlah Makan dan Minum Rapat Yang Tersedia				200 Pax	200 Pax										
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Dilaksanakan				30 Kali	30 Kali										
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Yang Dilaksanakan				30 Kali	30 Kali										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Jenis	3 Jenis				3						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat/Barang Yang Dikirim				139 Surat / Barang	139 Surat / Barang										
		Jumlah Materai				136 Lembar	136 Lembar										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Fax, Tv Kabel, Virtual Meeting Yang				12 Bulan	12 Bulan										

		Dibayarkan															
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Yang Dipekerjakan				7 orang	7 orang				7						
		Jumlah Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor Yang Tersedia				100 Jenis	100 Jenis										
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD Yang Dipelihara				10 Jenis	10 Jenis										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki				10 Unit / Jenis	10 Unit / Jenis										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi	Jumlah Gedung / Bangunan Yang Terpelihara				1 Unit	1 Unit										

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara				1 Unit / Jenis / Set	1 Unit / Jenis / Set										
		Jumlah BBM Genset				0 liter	0 liter										
2	Program: Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah profil investasi	1 profil investasi					1 profil investasi					100				
		Jumlah UKM yang bermitra dengan investor	1 UKM					1 UKM					100				
		Pertambahan Jumlah Profil investasi sektor pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian		0	0				0	0				0			
		Pertambahan jumlah UKM Pertanian yang bermitra dengan investor		1 UKM Sektor Pertanian	1 UKM Sektor Pertanian				1 UKM Sektor Pertanian	0				100			
		Pertambahan		0	0				0	0				0			

		Jumlah Profil investasi sektor kelautan dan perikanan yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor kelautan dan perikanan															
		Pertambahan jumlah UKM kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor		1 UKM Sektor Kelautan dan Perikanan	1 UKM Sektor Kelautan dan Perikanan			0	0				0				
		Pertambahan Jumlah Profil investasi sektor pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pariwisata		0	0			0	0				0				
		Pertambahan jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor		1 UKM Sektor Pariwisata	1 UKM Sektor Pariwisata			1 UKM Sektor Pariwisata	1				100	100			
		Pertambahan Jumlah Profil investasi sektor sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor sumber daya mineral		3 profil sumber daya mineral	3 profil sumber daya mineral			3 profil sumber daya mineral	0				100				
		Pertambahan jumlah UKM		1 UKM Sumber	1 UKM Sumber			1 UKM Sumber	0				100				

		sumber daya mineral yang bermitra dengan investor		daya mineral	daya mineral				daya mineral								
	Studi Kelayakan Potensi Investasi	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	1 kajian					1 kajian					100				
		Jumlah kajian potensi investasi		1 kajian					1 kajian					100			
		Jumlah dokumen kajian potensi investasi			1 kajian					0							
	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPIID)	Jumlah peserta yang terlatih	35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)	30 (18 peserta laki-laki dan 12 peserta perempuan)				35 (20 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)	30 (18 peserta laki-laki dan 12 peserta perempuan)				100	100			
		Jumlah elemen data SIPIID		6 elemen data SIPIID					6 elemen data SIPIID					100			
		Jumlah pengelola data SIPIID yang terlatih			20 (14 peserta laki-laki dan 6 peserta perempuan)												
	Rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah (RKPPMD)	Jumlah usulan rumusan strategi dan kebijakan penanaman modal	0	1 usulan				0	1 usulan				0	100			

		Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi			1 kali					1 kali					100		
		Jumlah peserta yang mengikuti rakor			45 (30 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)					45 (30 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)							
	Penyusunan kebijakan bidang penanaman modal	Jumlah regulasi/kebijakan yang disusun	0	0	0			0	0				0	0			
	Sosialisasi kebijakan di bidang penanaman modal	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0			0	0				0	0			
		Jumlah penyelenggaraan sosialisasi	0	0	0			0	0				0	0			
	Pelaksanaan matchmaking daerah	Jumlah UMKM Potensial yang melaksanakan kemitraan usaha	0	1 UMKM				0	1 UMKM				0	100			
		Jumlah penyelenggaraan matchmaking dalam negeri yang diikuti			4 kali												
	Workshop	Jumlah UKM yang	0	1 UKM				0	1 UKM				0	100			

	Pengembangan usaha daerah	memenuhi syarat kemitraan															
		Jumlah penyelenggaraan workshop			1 kali												
		Jumlah peserta yang mengikuti workshop			40 (30 peserta laki-laki dan 10 peserta perempuan)												
	Forum komunikasi pemberdayaan usaha daerah	Jumlah permasalahan UKM yang teridentifikasi	0	1 permasalahan				0	1 permasalahan				0	100			
		Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi			1 kali												
		Jumlah peserta forum komunikasi			50 (35 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)												
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Dengan Investor				80%	100%				80						
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman	Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor				1 UKM	1 UKM				4						

	Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah UKM Yang Memenuhi Syarat Kemitraan				8 UKM	8 UKM										
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi				1 Peta	1 Peta				1						
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi RUPM				1 Dokumen	1 Dokumen				-						
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi				1 Dokumen	1 Dokumen				1						
3.	Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor	7 investor (2 investor sektor pertanian, 1 investor sektor kelautan dan perikanan)					6 investor					85.71				

			n, 2 investor sektor pariwisata, 2 investor sektor sumber daya mineral)													
		Pertambahan jumlah investor sektor pertanian		3 investor sektor pertanian	3 investor sektor pertanian				6 investor sektor pertanian							
		Pertambahan jumlah investor sektor kelautan dan perikanan		2 investor sektor kelautan dan perikanan	2 investor sektor kelautan dan perikanan				3 investor sektor kelautan dan perikanan							
		Pertambahan jumlah investor sektor pariwisata		3 investor sektor pariwisata	3 investor sektor pariwisata				1 investor sektor pariwisata							
		Pertambahan jumlah investor sektor sumber daya mineral		3 investor sektor sumber daya mineral	3 investor sektor sumber daya mineral				0 investor sektor sumber daya mineral							
	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	4 pameran					4					100			
		Jumlah pameran investasi yang diikuti		5 pameran	6 pameran				3	0				60		
	Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah jenis bahan promosi	6 jenis bahan promosi					6					100			

		Jumlah bahan promosi yang tersusun		4 bahan promosi	0				4					100			
	Business Gathering Investment	Jumlah peserta Business Gathering	0	110 peserta (65 peserta laki-laki dan 45 peserta perempuan)	0			0	110 (65 peserta laki-laki dan 45 peserta perempuan)				0	100			
	Promosi Investasi Melalui Media Massa	Jumlah promosi investasi di media massa	0	0	0			0	0				0	0			
	Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang difasilitasi	0	7 calon investor	0			0	0				0	0			
3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang berinvestasi				65%	70%				100						
	Kegiatan Penyelenggara Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi Yang Terlaksana				3 Pameran promosi	4 Pameran promosi				-						
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal				1 laporan	1 laporan				-						

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Terlaksana				3 Pameran promosi	4 Pameran promosi				-						
4	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan, sektor pariwisata, sektor pertambangan)	0.43%					0.43%					100				
		Persentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi		0.44	45					91.20 %					102.03		
		Persentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi		0.44	45					82.45 %					183.22		
		Persentase perusahaan sektor pariwisata yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi		0.44	45					53.23 %					118.29		

		Persentase perusahaan sektor sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi		0.44	45					47.24 %					104.98		
	Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang terpantau	0	50 perusahaan	55 perusahaan			0	50 perusahaan	55 perusahaan			0	100	100		
	Sosialisasi Peraturan Terkait Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	0	40 perusahaan	0			0	40 perusahaan				0	100			
	Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	Jumlah peserta yang mengikuti workshop	0	50 peserta (36 peserta laki-laki dan 14 peserta perempuan)				0	50 peserta (36 peserta laki-laki dan 14 peserta perempuan)				0	100			
		Jumlah perusahaan yang mengikuti workshop			110 perusahaan					26 perusahaan					23.64		
		Jumlah aparatur yang mengikuti workshop			40 aparatur			0		20 aparatur					50		
	Bimbingan dan Penyelesaian Masalah Penanaman Modal	Jumlah penyelesaian masalah di bidang penanaman modal	0	0	4 kasus/permasalahan			0	0				0	0			
		Jumlah perusahaan bermasalah yang	0	0	4 perusahaan			0	0				0	0			

		difasilitasi			n												
		Jumlah kasus yang diselesaikan	0	0	4 kasus/per masalah			0	0				0	0			
	Penyusunan Profil Perusahaan Penanaman Modal secara Elektronik yang Tervalidasi	Persentase profil Perusahaan yang tervalidasi	0	0	19.51			0	0				0	0			
	Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari perusahaan	100 buku					100 buku					100				
	Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Jumlah data dan informasi penanaman modal		110 data					110 data								
		Jumlah dokumen LKPM			1 Dokumen					1 Dokumen					100		
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Patuh Terhadap Perundang-Undangan				15%	20%										
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Terpantau				75 perusahaan	60 perusahaan						67				

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Yang Dipantau				75 perusahaan	60 perusahaan				67					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop				507 Perusahaan dan aparat	150 Perusahaan dan aparat									
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kasus / Permasalahan Perusahaan Yang terselesaikan				2 kasus/per masalah	6 kasus/per masalah									
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Valid dan Up to date				100%	100%				100					
	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen				1					

	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen				1						
5	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Persentase penerbitan izin tepat waktu	78 %					10					12.82				
		Persentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral		79 %	82 %				65%	60.73 %				86.67	74.06		
		Rata-rata ketepatan waktu penyelesaian perijinan		11	10					10					100		
	Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah izin yang diterbitkan	1050 izin	1100 izin				906 izin	1091 izin				86.29	99.18			
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan			1150 izin					837 izin					72.78		

	Rakor Forum PTSP se-provinsi kepulauan bangka Belitung	Jumlah pelaksanaan rakor forum ptsp	0	2 kali	1 kali			3 kali	0				0	100			
		Jumlah peserta yang hadir	0	100 peserta (70 peserta laki-laki dan 30 peserta perempuan)	50 peserta (35 peserta laki-laki dan 15 peserta perempuan)			150 peserta (105 peserta laki-laki dan 45 peserta perempuan)	0				0	100			
	Penyusunan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan	Jumlah buku kompilasi berisikan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan	40 buku kompilasi	0	40 buku kompilasi			40 buku kompilasi	40 buku kompilasi				100	0			
	Penyediaan Sistem Informasi Perizinan	Aplikasi database	0	0	0			0	0				0	0			
	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	Jumlah buku penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	0	0	0			0	0				0	0			
	Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan PTSP	Jumlah dokumen kebijakan	0	0	1 dokumen			0	0				0	0			

6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP				100%	100%				100						
	Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Forum PTSP se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				1 laporan	1 laporan				-						
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Forum				50 Peserta	50 Peserta				-						
		Jumlah Rapat Koordinasi Forum PTSP se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				1 Rakor Forum	1 Rakor Forum				-						
	Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi				1100 izin	1150 izin				681						

		Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				2 laporan	2 laporan				2						
		Jumlah Laporan Pengaduan Yang di Tindak Lanjuti				2 laporan	2 laporan				2						
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Aplikasi Pendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				1 Aplikasi	1 Aplikasi				-						
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan				1100 Izin	1150 Izin				681						
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				2 Laporan SKM	2 Laporan SKM				2						
		Jumlah Laporan				12	12				8						

		Pengaduan Yang Di Tindak Lanjuti				Pengaduan	Pengaduan										
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP (UPT PPT Belitung)				100%	100%				100						
	Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi				100 izin	100 izin				120						
		Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				2 laporan	2 laporan				2						
		Jumlah Laporan Pengaduan Yang di Tindak Lanjuti				2 laporan	2 laporan				2						
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan				100 Izin	100 Izin				120						
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Jumlah Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				2 Laporan SKM	2 Laporan SKM				2						

	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan																
		Jumlah Laporan Pengaduan Yang Di Tindak Lanjuti				12 Pengaduan	12 Pengaduan				2						

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	190.000.000	195.000.000	133.010.146	133.010.146	185.000.000	173.804.576					91.48					-16	
Pendapatan Asli Daerah	190.000.000	195.000.000	133.010.146	133.010.146	185.000.000	173.804.576	39.174.468.895				91.48						
Dana																	

Perimbangan																	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah																	
BELANJA DAERAH	9.290.578.951	18.939.319.874	10.944.570.070	10.792.323.207	10.084.830.809	8.896.779.083	11.544.950.976	10.335.534.623	9.573.060.891		95.76	60.96	94.44	88.70		28	30
Belanja Tidak Langsung	6.099.885.951	9.028.941.924	7.345.967.282	7.599.904.782	7.731.742.736	5.981.452.313	6.313.170.563	6.893.715.208	7.104.828.813		98.06	69.92	93.84	93.49		17	6
Belanja Langsung	3.190.693.000	9.910.377.950	3.598.602.788	3.192.418.425	2.353.088.073	2.915.326.770	4.739.438.084,5	3.441.819.415	2.468.232.078		91.37	47.82	95.64	77.32		48	70
Belanja Pegawai	300.644.000	221.500.000	1.164.873.000	-	-	281.844.000		-	-		93.75						

Belanja Barang dan Jasa	2.768. 929.00 0	5.853. 257.95 0	1.821.6 29.788	3.172. 418.42 5	2.353. 088.07 3	2.531. 537.87 0		3.441. 819.41 5	2.468. 232.0 78		91. 42						
Belanja Modal	121.12 0.000	3.835. 620.00 0	612.10 0.000	20.000 .000	-	101.94 4.900		-	-		84. 17						
PEMBIA YAAN																	
TOTAL	9.290. 578.9 51	18.93 9.319. 874	10.94 4.570. 070	10.79 2.323. 207	10.08 4.830 .809	8.896 .779. 083	11.54 4.950. 976	10.33 5.534. 623	9.573 .060. 891		95. 76	60. 96	94 .4 4	88. 70		28	30

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Program /Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program: Peningkatan Pelayanan Pemerintah	1.695.717.000	6.962.563.246	2.863.561.424			1.553.962.747	3.289.942.698,50	2.726.533.200			91.64	47.25	95.21			47	112
Pelayanan Administrasi Perkantora	1.269.118.000	2.916.193.246	1.418.880.524			1.182.694.647	1.424.213.186	1.373.049.327			93.19	48.84	96.77			23	20

n																	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	311.764.000	3.981.370.000	835.775.000			259.251.100	1.844.754.012,50	789.400.100			83.16	46.33	94.45			17	612
Peningkatan disiplin aparatur	47.300.000					47.300.000					100						
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		60.000.000					19.500.000					32.5				33	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	45.855.000	4.000.000	38.151.900			43.767.000	985.500	38.151.900			95.45	24.64	100			54	-98
Penyusunan Pelaporan Capaian	21.680.000	1.000.000	22.625.000			20.950.000	390.000	22.624.000			96.63	39	99.99			26	-98

Kinerja dan Keuangan																	
Peningkatan Gedung Kantor																	
Peningkatan Pelayanan Kantor UPTD PTSP			548.129.000					503.307.873					91.82				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.863.539.150	13.107.091.059				8.751.151.729					88.72			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				62.862.500	72.291.875				22.154.200					35.24			

Daerah																	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				50.79 5.000	58.41 4.250												
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.06 7.500	13.87 7.625												
Kegiatan Administrasi Keuangan				7.599. 904.7 82	9.669. 053.4 91				7.10 4.82 8.81 3					93. 49			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.599. 904.7 82	9.669. 053.4 91				7.10 4.82 8.81 3								

Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya				-	269.928.000				-								
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	138.920.000												
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	131.008.000												

Kegiatan Administ rasi Umum Perang kat Daerah				827.2 91.86 8	1.585. 067.4 93				410. 480. 382					49. 62			
Sub Kegiatan Penyediaa n Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				27.00 0.000	40.00 0.000												
Sub Kegiatan Penyediaa n Peralatan dan Perlengka pan Kantor				20.00 0.000	450.4 65.49 3												
Sub Kegiatan Penyediaa				14.48 0.000	16.65 2.000												

n Bahan Logistik Kantor																	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				72.00 0.000	87.95 0.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				38.00 0.000	45.00 0.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material				102.7 50.00 0	150.0 00.00 0												

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu				59.00 0.000	95.00 0.000												
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				494.0 61.86 8	700.0 00.00 0												
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.199. 730.0 00	1.288. 820.2 00				1.09 6.63 4.69 2					91. 41			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat				21.14 8.000	24.32 0.200												

Menyurat																	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				187.900.000	250.000.000												
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				990.682.000	1.014.500.000												
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				173.750.000	221.930.000				117.053.642					67.37			

Daerah																	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				105.550.000	130.000.000												
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000	51.750.000												
Sub Kegiatan Pemeliharaan				20.000.000	25.000.000												

aan / Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
Sub Kegiatan Pemelihara aan / Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.200. 000	15.18 0.000												
Program: Peningka tan Perencan aan dan Pengemb angan	264.5 46.00 0	829.84 1.754	84.212 .380			247.0 38.22 1	466.12 9.456	84.2 12.3 80			93. 38	56. 17	10 0			83	89

Iklm Penanam an Modal																	
Studi Kelayakan Potensi Investasi	264.54 6.000	277.860 .000	13.884. 640			247.03 8.221	128.395 .402	13.8 84.6 40			93. 38	46. 21	100			5	-48
Pemutakhi ran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)		28.764. 000					0									247	
Rapat koordinasi perencana an dan pelaksana an penanama n modal daerah (RKPPMD)		19.764. 300	61.717. 440				18.493. 500	61.7 17.4 40				93. 57	100			401	

Penyusunan kebijakan bidang penanaman modal																	
Sosialisasi kebijakan di bidang penanaman modal																	
Pelaksanaan matching daerah		402.657.454	8.610.300				319.240.554	8.610.300				79.28	100			-25	
Workshop Pengembangan usaha daerah		64.946.000					0									-30	
Forum komunikasi pemberdayaan usaha daerah		35.850.000					0									35	

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				447.9 51.00 0	543.6 63.65 0				208. 702. 599					46. 59			
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				236.8 25.00 0	290.1 73.75 0				50.5 03.6 44					21. 33			
Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif				236.8 25.00 0	290.1 73.75 0				50.5 03.6 44					21. 33			

dan Kemudaha n Penanama n Modal																	
Kegiatan Pembuata n Peta Potensi Investasi Provinsi				211.1 26.00 0	253.4 89.90 0				158. 198. 955					74. 93			
Sub Kegiatan Penyusuna n Rencana Umum Penanama n Modal Daerah Provinsi				46.04 6.000	52.95 2.900				-					-			
Sub Kegiatan Penyediaa n Peta Potensi dan Peluang				165.0 80.00 0	200.5 37.00 0				158. 198. 955					95. 83			

Usaha Provinsi																	
Program Peningkatan Promosi Investasi	690.735.000	613.030.000	35.037.060			599.807.818	299.411.000	35.037.060			86.84	48.84	100			14	-50
Penyelenggaraan Pameran Investasi	480.815.000	382.725.000	35.037.060			398.551.160	174.501.000	35.037.060			82.89	45.59	100			48	-56
Pembuatan Bahan Promosi	209.920.000	121.550.000				201.256.658	102.910.000				95.87	84.67				-42	-49
Business Gathering Investasi		108.755.000					22.000.000					20.23					
Promosi Investasi Melalui Media Massa																	
Peningkatan Pelayanan																	

Peluang Investasi																	
Program Promosi Penanaman Modal				382.6 65.00 0	452.7 26.25 0				22.2 80.3 00					5.8 2			
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				382.6 65.00 0	452.7 26.25 0				22.2 80.3 00					5.8 2			
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				20.20 0.000	35.89 1.500				-					-			

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi				362.4 65.00 0	416.8 34.75 0				22.2 80.3 00					6.1 5			
Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Investasi dan Sistem Informasi		553.68 0.000	663.27 0.000	175.0 47.03 0			318.06 1.260	168. 341. 480				57. 45	96. 17			20	
Pemantauan Pelaksana		464.595 .000	345.000 .000	98.07 0.000			272.484 .060	91.3 64.4 50				58. 65	93. 16			-26	

an Ketentuan Penanama n Modal																	
Sosialisasi Peraturan Terkait Penanama n Modal		30.950. 000					26.312. 200					85. 02					
Workshop Laporan Kegiatan Penanama n Modal (LKPM) Online		19.565. 000	109.320 .000	52.12 0.360			19.265. 000	52.1 20.3 60				98. 47	100			459	
Bimbingan dan Penyelesai an Masalah Penanama n Modal			100.000 .000														
Penyusuna n Profil																	

Perusahaan Penanaman Modal secara Elektronik yang Tervalidasi																	
Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal		38.570. 000	108.950 .000	24.85 6.400			0	24.8 56.4 00					100			182	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				299.7 56.80 0	367.1 33.82 0				322. 680. 400					10 7.6 5			
Kegiatan Pengendalian				299.7 56.80	367.1 33.82				322. 680.								

ian Pelaksana an Penanama n Modal yang Menjadi Kewenang an Daerah Provinsi				0	0				400								
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisa si Pemantau an Pelaksana an Penanama n Modal				169.7 50.80 0	215.1 07.50 0												
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisa				79.24 0.000	98.29 2.570												

si Pembinaa n Pelaksana an Penanama n Modal																	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisa si Pengawas an Pelaksana an Penanama n Modal				50.76 6.00	53.73 3.750												
Program Pengelol aan Data dan Sistem Informas i Penanam				65.63 6.000	82.66 8.900				28.8 50.6 00					43. 96			

an Modal																	
Kegiatan Urusan Pengelolaa n Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanama n Modal yang Terintegra si pada Tingkat Daerah Provinsi				65.63 6.000	82.66 8.900				28.8 50.6 00								
Sub Kegiatan Pengolaha n, Penyajian dan Pemanfaat an Data				65.63 6.000	82.66 8.900				28.8 50.6 00								

dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	539.695.000	951.262.950	440.744.894			514.517.984	365.893.670	427.695.295			95.33	38.46	97.04			28	-29
Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi	509.485.000	886.056.950	440.744.894			485.168.384	349.345.670	427.695.295			95.23	39.43	97.04			21	-28

Kepulauan Bangka Belitung																	
Rakor Forum PTSP se- provinsi kepulauan bangka Belitung		65.206. 000					16.548. 000					25. 38				62	
Penyusunan rekapitulasi data perizinan dan non perizinan	30.210 .000					29.349 .600					97. 15						
Penyediaan Sistem Informasi Perizinan																	
Penyusunan standar operasional																	

prosedur (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal																	
Penyusunan Kebijakan Standar Pelayanan dalam penyeleng garan PTSP			37.881. 750														
Program Pelayana n Penanam an Modal				453.0 00.00 0	524.8 02.50 0				239. 395. 263					52. 85			
Kegiatan Penanama n Modal Yang Ruang Lingkupny a Lintas				36.55 0.000	46.00 0.000				-								

Daerah Kabupaten /Kota																	
Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaa n Layanan Konsultasi dan Pengelolaa n Pengadua n Masyaraka t terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				36.55 0.000	46.00 0.000				-								
Kegiatan Penanama n Modal Yang Menurut				416.4 50.00 0	478.8 02.50 0				239. 395. 263					57. 49			

Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi																	
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				36.65 0.000	42.03 2.500				-								

Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				371.500	427.282.500				239.395.263					64.43			
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan				8.250.000	9.487.500				-								

dan Non Perizinan																	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sedangkan Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Tantangan :

1. Membangun relationship dengan para investor dalam dan luar negeri.
2. Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Promosi investasi daerah.
4. Monitoring dan evaluasi perusahaan PMA dan PMDN yang bermasalah.
5. Membangun kepercayaan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Peluang :

1. Adanya dukungan dan Kebijakan Pusat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Kerjasama selatan-selatan untuk menjaring investor dari negara berkembang.
3. Geoposisi kepulauan bangka belitung yang terletak pada jalur alur laut kepulauan indonesia (ALKI-I).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah dipetakan ke dalam tabel pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan

Untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dinas Koperas dan UKM

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UMKM terutama pada masa pandemi Covid-19	Catatan agik yg lalu	-
2.	Terbatasnya kemampuan wirausaha SDM Koperasi dan UMKM		
3.	erbatasnya jaringan usaha baik UMKM maupun koperasi		
4.	Rendahnya kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber		

	permodalan		
5.	Belum optimalnya kemampuan desain <i>packaging</i>		
	Terbatasnya pemasaran produk KUMKM		
	Keterbatasan dana pembinaan dan pengembangan KUMKM pada kabupaten/kota sehingga sinergitas pembinaan dan pengembangan KUMKM yg dilakukan OPD Provinsi kurang maksimal		
	Terbatasnya calon eksportir dan promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah		
	Organisasi PKL belum teroganisir secara formal		
	Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif		
	Belum tersedia dan terkelolanya data dan informasi mengenai		

	KUMKM yang akurat untuk mendukung proses pembinaan dan pengembangan		
	Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian		

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis perangkat daerah dapat dilihat dari identifikasi permasalahan berdasarkan program-program dan mengacu pada isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;

2. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
3. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;
4. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
5. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;

6. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
7. Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;
8. Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
9. Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;
10. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
11. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
12. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah beserta indikator kinerjanya disajikan sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	80%	80%	80%	80%
			Indeks Reformasi Birokrasi					
2.	Meningkatkan kesempatan kerja	Penciptaan Lapangan Kerja	persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	0,47%	0,51%	0,56%	0,62%
			persentase tenaga kerja yang bekerja disektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	18,2	27,3	27,3	45,5
		Meningkatkan kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka		250	260	270	280

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 diantaranya adalah :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Misi I :		Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis Agri-Bahari						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			I (2023)		II (2024)		III (2025)	
Meningkatnya investasi	Meningkatnya realisasi investasi	1. Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah	1. Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah	1. Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah	Mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah
Misi III :		Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			I (2023)		II (2024)		III (2025)	

Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah	1.	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	1. 1	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Internal Perangkat Daerah
---	--	----	---	---------	---	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan rangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 4 (empat) tahun.

Bab ini menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan

		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
			Indeks Kepuasan Pelayanan Internal (UPT Balatkop)
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPT Belitung)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT Balatkop)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
		Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

			dipelihara/direhabilitasi
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPT PPT Belitung)	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan
Meningkatkan kesempatan kerja	Penciptaan Lapangan Kerja	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan
		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pemutakhiran data dan penguatan kelembagaan UMKM Jumlah UMKM yang dibina dan Didampingi Jumlah UMKM yang bermitra
		Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
			Jumlah Data UMKM yang divalidasi
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan
			Jumlah Data UMKM yang berpotensi untuk bermitra
			Jumlah Data Pengembangan Kemitraan UMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH (UMKM)	Persentase Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah
		Pengembangan Usaha kecil dengan Orientasi Peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah	Jumlah Usaha kecil yang meningkat menjadi usaha menengah Jumlah UMKM yang dikembangkan usahanya melalui promosi dan pemasaran Jumlah Usaha Kecil Yang dikembangkan usahanya melalui sertifikasi dan standarisasi
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang meningkat	Jumlah Unit Usaha UMKM yang meningkat

--

standar produksi, pengolahan, desain dan teknologi, perluasan jaringan pemasaran, dan SDM	standar produksi, pengolahan, desain dan teknologi, perluasan jaringan pemasaran, dan SDM
Jumlah UMKM dilakukan peningkatan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara	Jumlah UMKM dilakukan peningkatan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara
Jumlah UMKM yang diinventarisasi untuk dipromosikan dan dipasarkan	Jumlah UMKM yang diinventarisasi untuk dipromosikan dan dipasarkan
Jumlah produk UMKM yang diinventarisasi untuk dipromosikan dan dipasarkan	Jumlah produk UMKM yang diinventarisasi untuk dipromosikan dan dipasarkan
Jumlah data UMKM yang distandarisasi	Jumlah data UMKM yang distandarisasi
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang difasilitasi
Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam
Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi dan

	Meningkatkan kesempatan kerja		diperiksa
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat
		Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Kesehatan KSP/USP yang dinilai
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian

	Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi Kesehatan	Jumlah Koperasi Hasil Pengukuran Tingkat Kesehatan
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang diberdayakan
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan restrukturisasi Usaha
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan

--	--

	Pengembangan Ekonomi Lainnya
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi, UKM yang terlatih
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang terlatih
	Jumlah Dokumen mutu dan layanan pendidikan dan latihan Perkoperasian
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM UKM yang terlatih
	Jumlah Dokumen mutu dan layanan pendidikan dan latihan Bagi UKM
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang memahami pengetahuan perkoperasian
	Jumlah Dokumen administrasi penyelenggaraan pelatihan perkoperasian
	Jumlah laporan mutu layanan pendidikan dan perkoperasian
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UKM yang meningkat Pengetahuan kapasitas dan kompetensi

			Jumlah dokumen penyelenggaraan pelatihan bagi UKM
			Jumlah dokumen mutu dan layanan pendidikan dan latihan bagi UKM

BATAS,

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan, Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022		Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		PD Penanggungjawab	Lokasi
						2023		2024		2025		2026					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip PD				78	395.000.000	79	414.750.000	80	435.487.500	81	457.261.875	81	1.702.499.375	dpmtsp	pangkalpinang
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				14 Dokumen	395.000.000	14 Dokumen	414.750.000	14 Dokumen	435.487.500	14 Dokumen	457.261.875	14 Dokumen	1.702.499.375	dpmtsp	pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	375.000.000	7 Dokumen	393.750.000	7 Dokumen	413.437.500	7 Dokumen	434.109.375	7 Dokumen	1.616.296.875	dpmtsp	pangkalpinang
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD				7 Laporan	20.000.000	7 Laporan	21.000.000	7 Laporan	22.050.000	7 Laporan	23.152.500	7 Laporan	86.202.500	dpmtsp	pangkalpinang
		Indeks kepuasan pelayanan internal (DPMPTSP)				69	11.560.329.872	70	11.846.246.365	72	13.010.458.683	75	12.707.981.617	75	49.125.016.537	dpmtsp	pangkalpinang
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Keuangan				74	8.118.329.872	75	8.524.246.365	77	80	2 laporan	9.397.981.617	80	35.891.016.537	dpmtsp	pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				60 OB	8.118.329.872	60 OB	8.524.246.365	60 OB	9.850.458.683	60 OB	9.397.981.617	60 OB	35.891.016.537	dpmtsp	pangkalpinang

	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (DPMPTSP)	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian				67	510.000.000	68	260.000.000	69	510.000.000	70	260.000.000	70	1.540.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				85 Paket	250.000.000			85 Paket	250.000.000			170 Paket	500.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				55 Orang	260.000.000	55 Orang	260.000.000	55 Orang	260.000.000	55 Orang	260.000.000	220 Orang	1.040.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (DPMPTSP)	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD				67	595.000.000	68	600.000.000	69	635.000.000	70	635.000.000	70	2.465.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Paket	35.000.000	4 Paket	40.000.000	4 Paket	45.000.000	4 Paket	45.000.000	16 Paket	165.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4 Paket	25.000.000	4 Paket	25.000.000	4 Paket	30.000.000	4 Paket	30.000.000	16 Paket	110.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	48 Paket	70.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	25.000.000	12 Paket	25.000.000	48 Paket	90.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 Paket	60.000.000	12 Paket	60.000.000	12 Paket	65.000.000	12 Paket	65.000.000	48 Paket	250.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Paket	30.000.000	12 Paket	30.000.000	12 Paket	35.000.000	12 Paket	35.000.000	48 Paket	130.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan				4 Paket	80.000.000	4 Paket	80.000.000	4 Paket	85.000.000	4 Paket	85.000.000	16 Paket	330.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	48 Laporan	200.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	250.000.000	48 Laporan	1.000.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	30.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DPMPTSP)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3	867.000.000	3	917.000.000	3	970.000.000	3	970.000.000	3	3.724.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	17.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	48 Laporan	74.000.000	dpmtsp	pangka lpinang

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	200.000.000	12 Laporan	200.000.000	48 Laporan	700.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	750.000.000	12 Laporan	750.000.000	12 Laporan	750.000.000	48 Laporan	2.950.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (DPMPTSP)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				151	720.000.000	183	545.000.000	183	545.000.000	183	645.000.000	183	2.455.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	140.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				3 unit	100.000.000	5 unit	150.000.000	5 unit	150.000.000	5 unit	150.000.000	5 unit	550.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 unit	10.000.000	10 unit	10.000.000	10 unit	10.000.000	10 unit	10.000.000	10 Unit	40.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				135 unit	75.000.000	164 unit	100.000.000	164 unit	100.000.000	164 unit	100.000.000	164 unit	375.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	150.000.000	2 unit	250.000.000	2 unit	700.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	350.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	650.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DPMPTSP)	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan				99	750.000.000	67	1.000.000.000	67	500.000.000	98	800.000.000	98	3.050.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan						1 Unit mobil dan 1 unit motor	500.000.000							dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				1 Paket	100.000.000					1 Paket	100.000.000	2 Paket	200.000.000	dpmtsp	pangka lpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				10 Unit printer, 5 unit laptop, 10 Komputer, 15 UPS, 15 telpon PABX, 2	500.000.000	10 Unit printer, 5 unit laptop, 10 Komputer, 15 UPS, 15 telpon PABX, 2 Televisi	500.000.000	10 Unit printer, 5 unit laptop, 10 Komputer, 15 UPS, 15 telpon PABX, 2 Televisi dan	500.000.000	10 Unit printer, 5 unit laptop, 10 Komputer, 15 UPS, 15 telpon PABX, 2	500.000.000	10 Unit printer, 5 unit laptop, 10 Komputer, 15 UPS, 15 telpon PABX, 2	2.000.000.000	dpmtsp	pangka lpinang

						Televisi dan 10 AC (67 unit)		dan 10 AC (67 unit)		10 AC (67 unit)		Televisi dan 10 AC (67 unit)		Televisi dan 10 AC (67 unit)			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				30 unit	100.000.000					30 unit	200.000.000	60 unit	300.000.000	dpmpstsp	pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 unit	50.000.000							1 unit	50.000.000		
		Indeks kepuasan pelayanan internal (UPT PPT Belitung)				68	6.095.500.000	69	608.000.000	70	615.000.000	71	616.700.000	71	7.935.200.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPT PPT Belitung)	Indeks Kepuasan Pelayanan administrasi umum PD				67	169.000.000	68	175.000.000	69	180.000.000	70	180.000.000	70	704.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Paket	12.000.000	4 Paket	13.000.000	4 Paket	13.000.000	4 Paket	13.000.000	16 Paket	51.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	16 Paket	60.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	48 Paket	60.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Paket	3.000.000	12 Paket	4.000.000	12 Paket	4.000.000	12 Paket	4.000.000	48 Paket	15.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan				12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	12 Paket	20.000.000	48 Paket	80.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	48 Paket	20.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan				4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	4 Paket	15.000.000	16 Paket	60.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	9.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	39.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	78.000.000	12 Laporan	83.000.000	12 Laporan	83.000.000	12 Laporan	319.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPT Belitung)	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3	299.900.000	3	306.400.000	3	306.400.000	3	308.100.000	3	1.220.800.000	UPT PPT Belitung	Belitung

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	40.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	26.000.000	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	32.500.000	12 Laporan	34.200.000	12 Laporan	125.200.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	263.900.000	12 Laporan	263.900.000	12 Laporan	263.900.000	12 Laporan	263.900.000	12 Laporan	1.055.600.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPT PPT Belitung)	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara				10	126.600.000	50	126.600.000	62	128.600.000	63	128.600.000	63	510.400.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeliharaan dan dibayarkan pajaknya				1 unit	13.000.000	1 unit	13.000.000	1 unit	14.000.000	1 unit	14.000.000	1 unit	44.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				2 unit	68.600.000	2 unit	68.600.000	2 unit	69.600.000	2 unit	69.600.000	2 unit	276.400.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	5.000.000	10 unit	20.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	40.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	40.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	80.000.000	UPT PPT Belitung	Belitung
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (UPT PPT Belitung)	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah yang diadakan				53	5.500.000.000								53 unit	UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				1 Paket	150.000.000									UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan				39 Unit	100.000.000									UPT PPT Belitung	Belitung
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				12 unit	250.000.000									UPT PPT Belitung	Belitung

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 unit	5.000.00 0.000									UPT PPT Belitung	Belitung
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Banyaknya investor yang menanamkan modal				23 Investor	1.300.00 0.000	25 Investor	1.300.00 0.000	27 Investor	1.900.00 0.000	30 Investor	2.200.00 0.000	30 Investor	6.700.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas/insentif investasi provinsi				2 Pelaku Usaha	500.000. 000	2 Pelaku Usaha	750.000. 000	2 Pelaku Usaha	1.000.00 0.000	2 Pelaku Usaha	950.000. .000	8 Pelaku Usaha	3.200.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	200.000. 000	1 Dokumen	400.000. 000	1 Dokumen	600.000. 000	1 Dokumen	500.000. .000	1 Dokumen	1.700.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang memperoleh insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				2 Kegiatan Usaha	300.000. 000	2 Kegiatan Usaha	350.000. 000	2 Kegiatan Usaha	400.000. 000	2 Kegiatan Usaha	450.000. .000	8 Kegiatan Usaha	1.500.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta peluang investasi provinsi				3 Dokumen	800.000. 000	3 Dokumen	550.000. 000	3 Dokumen	900.000. 000	3 Dokumen	1.250.00 00.000	3 Dokumen	3.500.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi				1 Dokumen Review Pergub	300.000. 000			1 Dokumen naskah akademis Raperda RUPM	300.000. 000	1 Dokumen draft Raperda RUPM	600.000. .000	1 Dokumen draft Raperda RUPM	1.200.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi				2 Dokumen	500.000. 000	2 Dokumen	550.000. 000	2 Dokumen	600.000. 000	2 Dokumen	650.000. .000	2 Dokumen	2.300.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Program Promosi Penanaman Modal	Peluang penanaman modal yang dipromosikan				2	850.000. 000	2	950.000. 000	2	675.000. 000	2	925.00 0.000	8	3.400.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal				4	850.000. 000	3	950.000. 000	3	675.000. 000	3	925.00 0.000	13	3.400.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi				2 Dokumen	200.000. 000	1 Dokumen	300.000. 000	2 Dokumen	150.000. 000	1 Dokumen	150.000. .000	6 Dokumen	800.000.000	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal				4 Dokumen	650.000. 000	3 Dokumen	650.000. 000	3 Dokumen	525.000. 000	3 Dokumen	775.000. .000	11 Dokumen	2.600.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap perundang-undangan				1 %	800.000. 000	1,1 %	900.000. 000	1,2 %	1.010.00 0.000	1,3 %	1.115.00 00.000	1,3 %	3.825.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang
	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha yang telah dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan				120 Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha	800.000. 000	130 Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha	900.000. 000	140 Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha	1.010.00 0.000	150 Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha	1.115.00 00.000	540 Pelaku Usaha/Kegiatan Usaha	3.825.000.0 00	DPMPTSP	Pangkalpinang

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				10 Kegiatan Usaha	100.000.000	15 Kegiatan Usaha	120.000.000	20 Kegiatan Usaha	150.000.000	25 Kegiatan Usaha	175.000.000	70 Kegiatan Usaha	545.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				80 pelaku usaha	300.000.000	80 pelaku usaha	330.000.000	80 pelaku usaha	360.000.000	80 pelaku usaha	390.000.000	320 pelaku usaha	1.380.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				30 Kegiatan Usaha	400.000.000	35 Kegiatan Usaha	450.000.000	40 Kegiatan Usaha	500.000.000	45 Kegiatan Usaha	550.000.000	150 Kegiatan Usaha	1.900.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang dikelola				1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi				1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	200.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Elektronik				12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokumen	200.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelaku Usaha yang terlayani				950 Pelaku Usaha	1.300.000.000	1000 Pelaku Usaha	1.600.000.000	1050 Pelaku Usaha	1.950.000.000	1125 Pelaku Usaha	2.300.000.000	4125 Pelaku Usaha	7.150.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan lintas daerah kabupaten/kota yang diterbitkan sesuai SOP				50 Perizinan Non Perizinan	350.000.000	75 Perizinan Non Perizinan	500.000.000	100 Perizinan Non Perizinan	650.000.000	125 Perizinan Non Perizinan	800.000.000	350 Perizinan Non Perizinan	2.300.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota				50 Pelaku Usaha	200.000.000	75 Pelaku Usaha	300.000.000	100 Pelaku Usaha	400.000.000	125 Pelaku Usaha	500.000.000	350 Pelaku Usaha	1.400.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi				50 Kegiatan Usaha	150.000.000	75 Kegiatan Usaha	200.000.000	100 Kegiatan Usaha	250.000.000	125 Kegiatan Usaha	300.000.000	350 Kegiatan Usaha	900.000.000	DPMPTSP	Pangkajene

		Pelaku Usaha															
	Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah perizinan dan non perizinan kewenangan Daerah Provinsi yang diterbitkan sesuai SOP				900 Perizinan dan Non Perizinan	950.000.000	925 Perizinan dan Non Perizinan	1.100.000.000	950 Perizinan dan Non Perizinan	1.300.000.000	1000 Perizinan dan Non Perizinan	1.500.000.000	3775 Perizinan dan Non Perizinan	4.850.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kewenangan Daerah Provinsi				900 Pelaku Usaha	450.000.000	925 Pelaku Usaha	500.000.000	925 Pelaku Usaha	600.000.000	1100 Pelaku Usaha	700.000.000	3850 Pelaku Usaha	2.250.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terfasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi				900 Kegiatan Usaha	350.000.000	925 Kegiatan Usaha	400.000.000	925 Kegiatan Usaha	450.000.000	1100 Kegiatan Usaha	500.000.000	3850 Kegiatan Usaha	1.700.000.000	DPMPTSP	Pangkajene
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi				900 orang	150.000.000	900 orang	200.000.000	900 orang	250.000.000	900 orang	300.000.000	3600 orang	900.000.000	DPMPTSP	Pangkajene

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Capaian Tahun 2022	Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Realisasi Investasi (Triliun Rp)	4,3 Trilyun Rupiah	-	2,5 Trilyun Rupiah	3,25 Trilyun Rupiah	4,25 Trilyun Rupiah	5,7 Trilyun Rupiah	5,7 Trilyun Rupiah
2.	Nilai Reformasi Birokrasi PD	69	-	71	71,5	72	72,5	72,5

.....

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu

Air Itam Pangkalpinang